

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ardi Candra

NPP. 30.0982

Asdaf Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Keuangan Publik

ardican58@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Bahrullah Akbar, SE., MBA, CIPM, CA, CPA, CSFA, C.FrA,
CGCAE, QGIA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Implementation of local government financial performance, namely how the government is able to maximize regional revenue sources as well as be effective and efficient in using regional revenue and expenditure budgets. Based on the percentage of regional original revenue contribution for Kutai Kartanegara Regency in 2017-2021 it is very low, namely only around 10% of the total realized regional income. **Purpose:** This study aims to analyze the financial performance of the regional government of Kutai Kartanegara district for the 2017-2021 fiscal year. **Method:** This study used a qualitative method with a descriptive approach and data collection used a descriptive method with an inductive approach. This study uses the theory of financial ratio analysis by Mahmudi which consists of the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, the ratio of the effectiveness of regional original income and the ratio of spending efficiency. **Result:** The results of this study show that the ratio analysis of the degree of fiscal decentralization is 11.19% in the less category, the ratio analysis of regional financial independence is 13.07% in the very low category, the ratio of effectiveness of Local Own Revenue is 127.61% which is categorized as very effective, the ratio of spending efficiency is 82% in the quite efficient category. **Conclusion:** From the results of this study, in Kutai Kartanegara Regency it is still low in supporting the implementation of regional autonomy but has increased every year. In overcoming these problems, the researcher's suggestion is that local governments can optimize the realization of tax revenues and increase the realization of the previously budgeted budget and place employees according to their competencies.

Keywords: Analysis, Financial Performance, Financial Ratio Analysis

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berdasarkan persentase kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021 sangat rendah yaitu hanya sekitar 10% dari total realisasi pendapatan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah belum mampu

untuk mengoptimalkan upaya dalam menggali sumber potensi daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2017-2021. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi yang terdiri atas rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 11,19% dalam kategori kurang, analisis rasio kemandirian keuangan daerah 13,07% dalam kategori sangat rendah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah 127,61% dikategorikan sangat Efektif, rasio efisiensi belanja 82% dalam kategori cukup efisien. **Kesimpulan:** Dari hasil penelitian ini, di Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah namun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut saran peneliti adalah pemerintah daerah dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan realisasi anggaran yang dianggarkan sebelumnya serta menempatkan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki. **Kata kunci:** : Analisis, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan”. Oleh karena itu otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan serta kewajiban bagi daerah guna melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah dengan teratur melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pertanggungjawaban.

Perubahan bidang ekonomi, sosial, dan politik di era reformasi saat ini berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama tuntutan masyarakat akan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan demokratisasi pengambilan keputusan untuk lebih memenuhi pemerintahan, masyarakat, sosial. pelayanan, dan penegakan hukum. Pelaksanaan kekuasaan daerah, hak dan kewajiban daerah dapat diatur menurut undang-undang dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini mengacu pada subsistem sistem pengelolaan keuangan daerah yang merupakan muatan utama dalam pengelolaan pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut menekankan bahwa pemerintah dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dengan mempercepat proses menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dengan meningkatkan layanan, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat. Kemudian

dijelaskan juga bahwa pada pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menangani segala urusan pemerintahan.

Upaya optimalisasi pelaksanaan self government menuntut daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Berdasarkan pemikiran tersebut, unit pengelola pajak daerah harus dapat mengoptimalkan peran sertanya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, serta terus memberikan dukungan pembiayaan bagi pengelolaan dan pembangunan pemerintah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Status keuangan suatu daerah dinilai baik, artinya daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk memberikan dukungan keuangan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan alat kebijakan yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik daerah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintah daerah itu sendiri. "APBD memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja" (Mahmudi, 2010). "Penilaian kinerja APBD sangat penting dalam kerangka menuju penguatan otonomi daerah dengan new game dan new rule-nya" (Mardiasmo, 2002).

"Kinerja keuangan merupakan suatu pengukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan" (Sularso, H. dan Yanuar E. Restianto, 2011). "Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD" (Halim, A. dan M. Syam Kusufi, 2012). Analisis rasio keuangan dalam APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungannya. Pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai misi pemerintah, pembangunan, dan penyelenggaraan pelayanan sosial di masyarakat. APBD merupakan kebijakan utama pemerintah daerah. Sebagai sebuah kebijakan, APBD memainkan peran sentral dalam membangun kapasitas dan efisiensi pemerintah daerah. Sebagai salah satu alat ekonomi dan keuangan daerah, APBD tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung peran sentral dalam membangun kapasitas dan efisiensi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting dan harus terus dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas dan tanggung jawab.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pendapatan pemerintah daerah dan/atau dana perimbangan merupakan unsur APBD yang paling penting dan dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah secara desentralisasi. Berikut adalah tabel mengenai kontribusi dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 1.1 Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Kontribusi Pendapatan Transfer (%)
2017	3.402.599.166.649	2.967.086.004.775	87
2018	4.056.073.917.135	3.660.941.790.075	90
2019	5.745.271.078.058	5.093.805.634.922	89
2020	4.456.587.090.186	3.885.815.451.652	87
2021	4.443.234.734.944	3.615.376.629.670	81
Rata-Rata			87

Sumber : BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil data yang telah diolah diatas, yang dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi dana perimbangan dan/atau pendapatan transfer pada tahun 2017-2021 terjadi kenaikan dan penurunan yang berkala pada total pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Perihal yang sama terjadi pada dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata kontribusi dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat lebih besar. Rata-rata Kontribusi dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai angka 87% yang diartikan memiliki peran dalam menunjang pelaksanaan urusan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara melalui hal ini belum diketahui apakah masih mampu untuk melaksanakan urusan otonomi daerah tanpa dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pusat. Dari sini akan dibahas apakah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bisa dikatakan mampu mendanai atau belum sekalipun. Perlu diketahui bahwa dalam menunjang urusan pemerintahan itu harus dilengkapi dengan keuangan yang cukup untuk membiayai proses keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah harus berfokus pada potensi yang mungkin bisa digunakan menambah jumlah pendapatan daerah untuk terus bisa mengondisikan segala pengeluaran daerah. Terkondisikannya pengeluaran daerah tentunya akan searah dengan kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang ada didalamnya. Maka dari itu, dibutuhkan beberapa variasi untuk meningkatkan inovasi untuk dapat memungut segala sumber pendapatan asli daerah yang ada pada wilayah tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atas kinerja keuangan pemerintah daerah atas beberapa wilayah pemerintah daerah merupakan pedoman penulis untuk turut melaksanakan analisis yang demikian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada penelitian pertama ditemukan bahwa kinerja keuangan secara

keseluruhan di daerah Kabupaten Kebumen sudah terlaksana dengan baik. Pada penelitian kedua, kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik tetapi masih belum berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerahnya. Pada penelitian ketiga, berdasarkan dua rasio yang digunakan ditemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di pulau Sumatera masih belum optimal. Rata-rata kemampuan keuangan pemerintah daerah dikategorikan rendah dengan pola instruktif. Pada kajian keempat ditemukan bahwa indikator tingkat kemandirian keuangan kota Bogor bersifat advisory, sebaliknya, pemerintah kabupaten di Kota Bogor sangat efektif dalam mewujudkan pendapatan asli daerahnya sendiri. dan mempertahankan pertumbuhan yang positif. Namun, Pemkot Bogor tetap memprioritaskan anggaran belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung.

Penelitian kelima menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi rata-rata hanya 8,15% pada tahun anggaran 2009-2013 yang merupakan tingkat yang sangat rendah yang menunjukkan pola hubungan yang bersifat instruktif. PAD Kabupaten Sukabumi memiliki rasio efisiensi sebesar 105,67% dari asumsi anggaran rata-rata tingkat pelaksanaan tahun anggaran 2009-2013, sangat efektif. Berdasarkan indikator efisiensi PAD, hasil keuangan Kabupaten Sukabumi TA 2009-2013 tergolong sangat efisien dengan rata-rata tahunan sebesar 5,02%. Kajian keenam menemukan bahwa pelaksanaan akuntabilitas di pemerintahan desa Sanja masih banyak kelemahan, dan kinerja keuangan desa Sanja tahun 2011-2012 masih kurang baik. Hal ini karena target pendapatan pada periode tersebut tidak mencapai 100%.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemerintah kotamadya lebih mandiri daripada pemerintah kabupaten. Rasio efisiensi kabupaten-kota sangat efektif dengan rata-rata 120,06%. Hasil Uji T dan Uji Mann-Whitney menunjukkan tidak ada perbedaan antara rasio efektivitas, sedangkan rasio independensi menunjukkan perbedaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Katanegara, dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Katanegara kedepannya. Penelitian ini nantinya akan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Dan Rasio Efisiensi Belanja. Selain itu Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Penulis menyajikan data keuangan dalam bentuk statistik yang kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi. Data statistik yang digunakan tidak ditampilkan sebagai pengujian teori maupun hipotesis sebagaimana fungsi data statistik pada penelitian kuantitatif. Namun, data statistik yang disajikan tersebut digunakan penulis sebagai bahan untuk menjelaskan keadaan atau gambaran objek yang diteliti. (Neuman, W.L, 2006) mengemukakan pendapatnya mengenai definisi penelitian deskriptif, yaitu: “Penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang memiliki tujuan utamanya yaitu untuk “memberikan gambaran” dengan menggunakan angka dan kata-kata disertai menyajikan klasifikasi jenis, profil (persoalan), atau garis besar tahapan untuk menjawab pertanyaan seperti kapan, dimana, siapa, dan bagaimana”.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu person (informan) sebagai pendukung dengan melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Kemudian, sumber data sekunder yang dipakai penulis yaitu paper(dokumen) yang merupakan sumber data berupa dokumen-dokumen sebagai pendukung sumber data primer. Dokumen yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017-2021, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017-2021, dokumentasi foto kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah aspek kinerja, dan dokumentasi – dokumentasi lain yang dianggap layak untuk penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas mengenai deskripsi serta analisis data yang diperoleh penulis pada koleksi primer dan sekunder yang dilakukan di lapangan. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan orang dalam. Data tersebut merupakan data utama dalam analisis, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Hasil penelitian tersebut menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, variabel atau faktor yang menghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan analisis rasio keuangan daerah guna mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan rasio kinerja keuangan daerah yang berdasar pada teori yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2016) yaitu sebagai berikut :

3.1. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Tabel 1
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
1	2017	435.513.161.873,75	3.402.599.166.648,75	12,80
2	2018	303.927.837.102,38	4.056.073.917.135,39	7,49
3	2019	552.433.123.136,41	5.745.271.078.058,41	9,62
4	2020	450.599.693.296,38	4.456.587.090.185,72	10,11
5	2021	707.307.156.824,89	4.443.234.734.944,34	15,92
Rata-Rata		489.956.194.446,76	4.420.753.197.394,52	11,19

Tabel 2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
1	2017	435.513.161.873,75	2.967.086.004.775,00	14,68
2	2018	303.927.837.102,38	3.660.941.790.075,00	8,30
3	2019	552.433.123.136,41	4.935.870.634.922,00	11,19
4	2020	450.599.693.296,38	3.885.815.451.652,00	11,60
5	2021	707.307.156.824,89	3.615.376.629.670,00	19,56
Rata-Rata		489.956.194.446,76	3.813.018.102.218,80	13,07

Tabel 3
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)
1	2017	435.513.161.873,75	453.397.588.009,56	96,06
2	2018	303.927.837.102,38	351.773.706.477,11	86,40
3	2019	552.433.123.136,41	391.645.109.320,43	141,05
4	2020	450.599.693.296,38	361.128.799.466,57	124,78
5	2021	707.307.156.824,89	372.697.241.716,00	189,78
Rata-Rata		489.956.194.446,76	386.128.488.997,93	127,61

Tabel 4
Rasio Efisiensi Belanja

No	Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja (%)
1	2017	3.189.732.113.185,00	4.404.430.449.920,70	72
2	2018	3.272.002.980.594,85	3.970.820.363.584,37	82
3	2019	4.651.963.685.227,46	5.494.776.456.337,06	85
4	2020	4.545.405.492.898,21	5.451.397.782.436,89	83
5	2021	4.714.130.498.075,44	5.327.845.124.546,00	88
Rata-Rata		4.074.646.953.996,19	4.929.854.035.365,00	82

Pada **Tabel 1** menunjukkan bahwa rasio desentralisasi Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 12,80% pada tahun 2017, turun menjadi 7,49% pada tahun 2018, kemudian naik menjadi 9,62% pada tahun 2019, naik menjadi 10,11% pada tahun 2020, dan akan meningkat menjadi 15,92% pada tahun 2021. Dengan demikian persentase desentralisasi Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun anggaran sebesar 11,19%. Jika diukur dalam skala interval berada pada skala 10.01-20.00, artinya rasio desentralisasi Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada skala interval yang lebih kecil. Hal ini disebabkan kontribusi PAD yang sangat kecil dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara yang sangat minim karena target PAD yang ditetapkan kecil untuk meningkatkan pendapatan PAD guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 19,56% pada tahun 2021 dan rasio terendah sebesar 8,30% pada tahun 2018. Pada tahun 2019-2021, proporsi kemandirian finansial terus meningkat setiap tahunnya, yaitu 11,19% pada tahun 2019, 11,60% pada tahun 2020, dan 19,56% pada tahun 2021. Jika diukur dengan skala interval antara 0-25 maka hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata sebesar 13,07% yang berarti kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada skala interval sangat rendah adalah menyajikan pola hubungan pemerintahan yang terbina dimana pemerintah pusat mendominasi pembiayaan administrasi pemerintah daerah, sedangkan tingkat kontribusi PAD masih rendah sehingga kemandirian daerah tetap rendah.

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki persentase efektivitas pengelolaan PAD sebesar 127,61%. Dalam skala interval, hal ini berarti Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong sangat efektif dalam mengelola PAD. Pada tahun 2017-2021, kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah masih belum memuaskan. Total pendapatan mentah daerah gagal memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan temuan kajian-kajian yang ada berdasarkan uraian sub bidang akuntansi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana dapat disimpulkan bahwa efektivitas tidak hanya dipengaruhi oleh cakupan potensi wilayah, tetapi juga oleh pengelolaan sumber daya yang ada.

Kemudian Pada Tabel 4 menunjukkan nilai Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017-2021. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa pada tahun anggaran 2017-2021, tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam standar cukup efisien. Artinya kinerja keuangan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengelola pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah sudah cukup efektif karena total belanja daerah tidak melebihi anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan. Kemudian, rata-rata rasio efisiensi belanja Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2017-2021 sebesar 82%, kriteria inklusi "Cukup Efisien"

3.2. Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan pemerintahan di era otonomi saat ini diharapkan mampu mengelola serta meningkatkan kemampuan fiskal sebagai tanggung jawab daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dapat diketahui dengan melihat kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang bertujuan memaksimalkan nilai dari pemerintah daerah. Untuk meningkatkan nilai yang dimaksud tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta menjadi harapan bagi setiap pemerintah daerah. Namun dalam mencapai hal tersebut tidaklah mudah dan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri yang dapat memberikan dampak negatif bagi kinerja keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara apabila tidak ditindaklanjuti dengan baik. Berikut

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara :

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam kategori efisiensi rendah dikarenakan kurangnya kualitas sumber daya manusia seperti operator yang mampu memanipulasi aplikasi sistem informasi keuangan yang dapat memudahkan pengelolaan anggaran. Hal ini sesuai dengan temuan wawancara penulis.

b. Efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dilihat dari hasil perhitungan angka kemandirian daerah, tingkat kemandirian Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam kategori sangat rendah yang berarti kinerja keuangan pemerintah daerah masih kurang baik. Dalam hasil penelitian yang menunjukkan selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara hanya setahun yang memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya, Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak berhenti sampai disitu realisasi belanja daerah juga tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pada setiap tahunnya terdapat sisa anggaran yang cukup besar yang seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang dapat menunjang kemajuan daerah.

c. Pelayanan Publik

Hasil penghitungan dari rasio pertumbuhan selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan PAD, belanja maupun pendapatan transfer pada kondisi yang fluktuatif hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah sehingga berpengaruh pada tingkat penerimaan daerah. Selain itu kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang terus menurun.

3.3. Upaya Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor penghambat tersebut bersumber dari dalam maupun dari luar pemerintahan itu sendiri namun dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai keterbatasan dan beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya ialah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kompetensi Pegawai

Berdasarkan hasil pengamatan penulis kompetensi pegawai merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus melakukan peningkatan kompetensi pegawai.

b. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatkan efektivitas pada setiap belanja daerah yang dianggarkan pada APBD adalah salah satu cara yang tepat dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait efektivitas yang dimaksud adalah berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target dari setiap kebijakan agar memperoleh hasil guna. Suatu kegiatan atau belanja dapat dikatakan efektif jika memiliki pengaruh yang besar terutama pada pelayanan publik.

Sedangkan efisiensi berkaitan dengan produktivitas setiap kegiatan dan belanja daerah sehingga penggunaan anggaran daerah lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan cara yang sudah sering digunakan oleh pemerintah daerah yakni upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yakni melakukan penyesuaian pada peraturan-peraturan terkait dengan usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbaru tanpa menunggu ketetapan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pengelola kekayaan daerah dengan mengelola penerimaan daerahnya terus melakukan upaya dalam mendorong peningkatan dalam pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat berdasarkan kinerja keuangan daerahnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya pada tahun anggaran 2017-2021. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Sukotjo, SE menjelaskan bahwa Selama 5 tahun anggaran terhadap perkembangan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Bapak Sukotjo, SE selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa, “Rendahnya pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya disebabkan oleh karakteristik daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri. Dimana sebagai daerah kabupaten komponen pendapatan daerah lebih terbatas apabila dibandingkan dengan daerah perkotaan”.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat perlu didukung oleh keuangan daerah agar dapat melaksanakan pembangunan daerah serta mencapai tujuan daerah. Keuangan daerah dikelola dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pendapatan daerah dan pelaksanaan dalam bentuk belanja daerah serta pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penerimaan daerah dalam struktur APBD diperoleh melalui pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data LRA APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021, dana transfer baik dari pemerintah Pusat maupun Provinsi merupakan sumber pendapatan daerah terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara sumber penerimaan APBD melalui pembiayaan bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah menunjukkan Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengoptimalkan kembali peningkatan terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi asli daerah yang ada sehingga total penerimaan daerah dapat meningkat. Selain itu pemerintah bisa juga melakukan pendataan, penetapan, dan penyesuaian secara berkala terhadap subjek dan objek pajak serta melakukan penataan dan penyesuaian terhadap potensi daerah agar lebih efisien. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat melakukan rotasi pegawai dengan menyesuaikan bidang kompetensi yang dimiliki dari setiap pegawai dan menambah tenaga operator yang lebih berkompeten dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi-aplikasi sistem informasi keuangan daerah agar lebih mempermudah pelaksanaan penganggaran di daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan kepada rekan-rekan lainnya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat melihat perkembangan kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada bapak Kepala Badan BPKAD beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Bang Bayu yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Halim, A. dan M. Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Neuman, W.L. (2006). *Basics of social research qualitative and Quantitative Approaches*. Second.
- Sularso, H. dan Yanuar E. Restianto. (2011). *Media Riset Akuntansi. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah*, Vol. 1, No.2, Agustus 2011.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah